

TPI & Realita Profesionalisme di Bidang Kelautan : Studi Kasus Penguatan Kapasitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari 45 dalam Menunjang Kinerja Pelayanan Perikanan di Pantai Depok, Bantul

Anggalih Bayu Muh Kamim

Anggalih.bayu@yahoo.co.id

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Fish auction place presence on every fishing harbor will provide considerable benefits both for the local government because it is one source of retribution, as well as for fishing, especially in the markets for its products which generally is one of the social groups that are still marginalized. Mina Bahari 45 as one of the fish auction in Bantul have a good role in implementing the fisheries ministry. Mina Bahari 45 taking various steps to strengthen the capacity to support fisheries ministry. This research is designed with descriptive qualitative approach with case study method. The case studies have viewed aspects of the peculiarities that exist in TPI Mina Bahari 45 in carrying out the process of capacity building. Data collected through open interviews, observation semi participation, and technical documentation. Data were analyzed using a model of Miles and Huberman consisting of data reduction process, presentation, verification and conclusion. The results showed Mina Bahari 45 have taken steps to strengthen specific capacities at various levels. At the individual level, Mina Bahari 45 has encouraged the replacement of fishing methods and appeals. At the organizational level, Mina Bahari 45 strengthening the capacity of the cultural agenda as alms in the form of sea, gathering, and clean beaches. At the system level is done through a process of standardization of administration and coordination with the Department of Marine and Fisheries Bantul.

Keywords : Fish Auction Place, Fisheries Ministry, Capacity Building.

ABSTRAK

Kehadiran TPI pada setiap pelabuhan perikanan akan memberikan manfaat yang cukup besar baik bagi Pemerintah Daerah setempat karena menjadi salah satu sumber retribusi, maupun bagi nelayan terutama dalam memasarkan hasil produksinya yang umumnya merupakan salah satu kelompok sosial yang masih terpinggirkan. TPI Mina Bahari 45 sebagai salah satu tempat pelelangan ikan di Bantul memiliki peranan yang baik dalam melaksanakan pelayanan perikanan. TPI Mina Bahari 45 melakukan berbagai langkah penguatan kapasitas dalam menunjang pelayanan perikanan. Riset ini didesain dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih melihat aspek kekhasan yang ada di TPI Mina Bahari 45 dalam melaksanakan proses penguatan kapasitas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka, observasi semi partisipasi, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri atas proses reduksi data, penyajian, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan TPI Mina Bahari 45 telah melakukan langkah-langkah penguatan kapasitas tertentu dalam berbagai level. Pada level individu, TPI Mina Bahari 45 telah mendorong penggantian metode penangkapan dan himbauan. Pada level organisasi, TPI Mina Bahari 45 melakukan penguatan kapasitas berupa agenda kultural seperti sedekah laut, arisan, dan bersih pantai. Pada level sistem dilakukan melalui proses pembakuan administrasi dan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul.

Kata Kunci : TPI, Pelayanan Perikanan, Penguatan Kapasitas.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sumber daya kelautan bernilai ekonomi penting, seperti: ikan pelagis besar (tuna, cakalang, marlin, lamadang), udang, lobster, terumbu karang dan jasa lingkungan (wisata), yang strategis dalam perdagangan lokal, nasional, regional dan internasional. Kecepatan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir DIY makin meningkat dan beragam seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan industri sehingga makin meningkatkan tekanan terhadap kelestarian ekosistem dan sumber daya. Provinsi DIY memiliki garis pantai sepanjang 113 km, yang terbentang pada 3 (tiga) kabupaten yaitu Gunungkidul (71 km), Bantul (17 km) dan Kulon Progo (25 km) serta wilayah perairan Laut Selatan DIY dan Samudera Hindia yang memiliki potensi sumber daya perikanan serta jasa lingkungan (wisata pantai) yang sangat menarik dan bernilai ekonomis penting. Potensi lestari dan produksi hasil perikanan bernilai ekonomis penting (ikan pelagis besar dan kecil dan lobster) di perairan Pesisir dan Laut Selatan DIY serta Samudera Hindia cukup besar, tetapi tingkat eksploitasinya baru mencapai 28,04%.

Di 3 (tiga) wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagian besar pesisirnya telah dikembangkan dan diperuntukkan bagi pengembangan wisata pantai, sedangkan aspek yang lainnya belum dikembangkan. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir DIY akibat tidak tergarapnya semua potensi yang ada, sehingga kurang optimal dalam memberikan pemasukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik masing-masing kabupaten maupun provinsi. Potensi ekosistem pesisir Kabupaten Bantul berdasarkan karakteristik spasial, yaitu wilayah pesisir dengan ciri khas pantai berlereng landai, bermaterial pasir, ada keberadaan gumuk pasir, dan material alluvium dari Gunung Merapi. Potensi wilayah pesisir Kabupaten Bantul tersebut telah dimunculkan dengan adanya penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan melibatkan beberapa dinas terkait, akan tetapi permasalahan yang muncul adalah penataan lebih cenderung dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau jika menghadapi suatu event. Sektor yang belum terlalu dilirik oleh pemerintah daerah Bantul dalam mengembangkan ekonomi lokal adalah bidang kelautan dan perikanan.

Usaha pemerintah daerah Bantul untuk meningkatkan perekonomian pesisir melalui bidang kelautan di antaranya dilakukan dengan cara membangun dan menyediakan tempat pelelangan ikan (TPI). Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 1 Tahun 2012 menjadi langkah bagi legalisasi operasionalisasi tempat pelelangan ikan di pesisir Bantul. Dalam rangka

pengelolaan sumber daya kelautan, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil laut terutama ikan, yang harus dikelola secara profesional sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat. Tempat Pelelangan Ikan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan; pemberdayaan dan pembinaan kelompok nelayan; dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sesuai perda, tempat pelelangan ikan tidak dapat dikelola oleh swasta. Tempat pelelangan ikan ini diselenggarakan oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana dalam proses penyelenggaraannya juga dapat menunjuk organisasi maupun kelompok nelayan untuk membantu proses pengelolaan.

Kabupaten Bantul mempunyai panjang pantai 17 km yang meliputi 3 kecamatan pesisir (Srandakan, Sanden, dan Kretek) dan 11 desa pesisir. Prasarana pendukung perikanan tangkap di Kabupaten Bantul saat ini berupa 6 buah TPI yaitu TPI Depok (Mina Bahari 45), TPI Mancingan, TPI Samas, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Pandansimo. Di antara kelima TPI lainnya, TPI Mina Bahari 45 (Depok) yang berlokasi di Pantai Depok, Kretek dapat dikatakan memiliki kinerja baik dibanding yang lainnya. TPI Mina Bahari 45 telah didukung dengan fasilitas yang relatif lengkap mengingat posisinya yang diprioritaskan sebagai wilayah pusat kuliner. TPI Pantai Depok merupakan salah satu pusat pelelangan ikan di pesisir Yogyakarta. Tempat ini cukup terkenal karena selain konsumen dapat membeli ikan segar secara langsung, beberapa warung disekitar pantai juga menyediakan masakan dari ikan segar yang langsung ditangkap oleh para nelayan.

TPI Mina Bahari 45 telah berupaya meningkatkan pelayanan guna memacu sektor perikanan dan kelautan di Bantul. Namun, dalam kenyataannya operasionalisasi TPI Mina Bahari 45 mengalami banyak kendala baik dari segi infrastruktur maupun proses pelayanan. Pemerintah Bantul sendiri nampaknya belum terlalu serius dalam meningkatkan sumbangsih sektor kelautan dan perikanan yang dibuktikan dengan masih tingginya intensitas kedatangan stok ikan dari luar daerah. Sifat tangkapan yang musiman di Pantai Depok, Bantul juga menyulitkan TPI Mina Bahari 45 untuk melaksanakan fungsi pelayanan yang maksimal. TPI Mina Bahari 45 terus mulai berbenah dan melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan pelayanan demi peningkatan pasokan ikan di level daerah. Oleh sebab itu, langkah penguatan kapasitas yang ditempuh TPI Mina Bahari 45 perlu dikaji lebih dalam untuk meningkatkan proses evaluasi untuk mencapai kinerja pelayanan yang semakin baik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti membuat rumusan masalah. sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelayanan perikanan yang dilakukan oleh TPI Mina Bahari 45 ?
2. Apa langkah-langkah yang ditempuh TPI Mina Bahari 45 untuk menunjang kinerja pelayanan yang baik ?

KAJIAN TEORI

Pemahaman tentang Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Menurut sejarahnya Pelelangan Ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan terutama di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya. Pada dasarnya sistem dari Pelelangan Ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi.

Salah satu diantara fungsi utama TPI adalah menyelenggarakan pemasaran atau pelelangan hasil tangkapan nelayan. Dalam proses pelelangan tersebut TPI akan mampu mengangkat daya tawar (*bargaining position*) nelayan ketika berhadapan dengan pedagang, dengan terciptanya harga dan sistem pembayaran yang layak tanpa merugikan pedagang. Dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diharapkan dapat mensejahterakan nelayan melalui program perkreditan nelayan yang dikelola KUD dan khususnya pada unit usaha pemerataan disamping pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nelayan dan memutuskan hubungan secara langsung antara nelayan dengan pedagang ikan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memiliki manfaat yang beragam bagi nelayan, pedagang ikan dan masyarakat. Manfaat yang dirasakan adalah sebagai tempat untuk melakukan jual beli yang terbuka dan saling menguntungkan, harga yang disepakati umumnya tinggi (tidak merugikan), pasar lebih luas (luar kota, restoran dan pabrik pengolahan ikan), dan dapat memperoleh ikan dalam berbagai jenis. Bagi masyarakat sekitar dapat membeli ikan dengan harga yang lebih murah. Mengingat pentingnya TPI dalam menunjang laju

perkembangan masyarakat dan membuat kemudahan dalam kegiatan masyarakat tersebut sehari-hari maka TPI sangat perlu untuk diadakan. TPI juga bermanfaat sebagai sarana berkumpul dan bersilaturahmi antara masyarakat yang satu dengan yang lain yang tinggal di sekitar TPI tersebut.

Kehadiran TPI pada setiap pelabuhan perikanan akan memberikan manfaat yang cukup besar baik bagi Pemerintah Daerah setempat karena menjadi salah satu sumber retribusi, maupun bagi nelayan terutama dalam memasarkan hasil produksinya nelayan yang umumnya merupakan salah satu kelompok sosial yang masih terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik, melalui kelembagaan TPI tersebut diharapkan akan menjadi lebih kuat, mandiri dan berdaya terutama dalam menolong dirinya sendiri, karena salah satu fungsi dari kelembagaan TPI tersebut adalah melakukan program penguatan atau pemberdayaan baik dalam aspek sosial ekonomi maupun kelembagaan para nelayan mitra kerjanya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik diharapkan akan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok dan masih banyak lagi, begitu luas ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayanan publik itu absah adanya. Dari banyak contoh dilapangan, seringkali terlihat aparat birokrasi yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Ketentuan bahwa birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik sehingga bukan lagi birokrasi yang melayani masyarakat, tetapi justru masyarakat yang melayani birokrasi. Sikap birokrat yang tidak mau melayani masyarakat secara efisien, adil dan transparan itu terlihat hampir pada semua instansi publik. Pendapat bahwa bekerja dengan rajin atau malas tetap mendapat gaji yang sama setiap bulan, turut mempertebal alasan keengganan para pegawai untuk bekerja dengan sebaikbaiknya. Organisasi pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas maka perlu adanya

peningkatan kinerja di jajaran birokrasi pemerintah, kesadaran diantara para pegawai pemerintah akan pentingnya mengubah citra pelayanan publik sangat diperlukan.

Dalam prinsipnya pelayanan publik adalah segala layanan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau birokrat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan atau masyarakat. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Menurut keputusan MENPAN ada beberapa hal dalam mengetahui pelayanan publik yang ideal yakni kesederhanaan, kejelasan akurasi dan kepastian hukum, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, serta tanggung jawab, kedisiplinan, keramahan dan kesopanan. Dalam konteks pemerintahan daerah, di era otonomi luas di tuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap jajaran aparatur pemerintah daerah. Dalam dunia yang penuh dengan kompetitif, sangat diperlukan kemampuan birokrasi dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan atau *responsive* terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif. Ini mengarah pada suatu konsepsi bahwa kemampuan yang dipunyai seorang aparat ditunjukkan dengan kesanggupannya sesuai dengan tingkat pengetahuannya dan keterampilan yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalamannya.

Pemahaman tentang Penguatan Kapasitas

Penguatan pemberi pelayanan dibutuhkan untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat, orangtua, dan murid disediakan sesuai kebutuhan dan standar tertentu yang diatur dalam peraturan perundangan. Membangun komitmen pemerintah merupakan upaya pertama agar pelayanan publik dapat menjadi kebijakan pemerintah secara berkelanjutan, baik pusat maupun daerah. Kebijakan ini sebaiknya dituangkan kedalam peraturan perundangan, perencanaan, dan penganggaran. Di era otonomi daerah sekarang ini, komitmen pemerintah daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga pemerintah daerah mempunyai mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan publik yang prima.

Pengembangan atau perubahan organisasi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang senantiasa harus dilakukan secara sistimatis. Pengembangan organisasi didasarkan pada upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah, sedang maupun akan terjadi. Karena itu, setiap organisasi harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap hubungan atau nilai tawar organisasi yang dimilikinya dengan

seluruh sistem yang melingkupinya. Menurut Varney terdapat empat faktor yang mempengaruhi) organisasi untuk berubah, yaitu: (1) Organisasi secara keseluruhan, meliputi perubahan dalam iklim dan kultur organisasi, gaya atau strategi kepemimpinan, hubungan dengan lingkungannya, pola komunikasi atau proses saling mempengaruhi, dan struktur organisasi; (2) Sub-sistem dan organisasi, meliputi perubahan dalam norma yang berlaku, struktur kelompok, struktur kekuasaan dan wewenang; (3) Pekerjaan dalam kelompok, meliputi perubahan dalam prosedur pengambilan keputusan, norma kerja, norma dan prosedur komunikasi, peran-peran dalam kelompok, kekuasaan dan wewenang; (4) Tingkat-tingkat penjenjangan, meliputi perubahan dalam pola saling mempengaruhi yang terjadi antar berbagai tingkat penjenjangan, lokasi pekerjaan atau tanggung jawab, kekuasaan dan wewenang, praktek dan prosedur komunikasi, tingkat saling percaya, citra diri dan citra orang lain terhadap citra diri sendiri, dan pengendalian.

METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang berguna untuk menggali realita yang terjadi di lapangan melalui serangkaian mekanisme analisis. Penelitian dibingkai dengan metode studi kasus untuk melihat kekhasan dan mengeksplorasi data terkait fenomena tertentu yang menarik di suatu daerah. Kasus dibatasi pada kekhasan langkah yang ditempuh TPI Mina Bahari 45 dalam melaksanakan proses penguatan kapasitas dalam menunjang kinerja pelayanan. Riset dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari 45, Pantai Depok, Bantul pada April – Mei 2016 dan Maret- April 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terbuka, observasi semi partisipasi, dan dokumentasi. Wawancara terbuka dilakukan kepada pengelola TPI Mina Bahari 45, petugas, tiga nelayan untuk menggali proses pelayanan dan upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan. Observasi semi partisipasi dilakukan untuk mengamati dan melibatkan peneliti secara pasif dalam proses pelayanan perikanan mulai dari pendorongan kapal sampai pelelangan ikan. Studi dokumentasi digunakan untuk melihat data struktur organisasi, alur kerja maupun memotret proses pelayanan di TPI Mina Bahari 45. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yang dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, sampai pada proses verifikasi serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pantai Depok memiliki potensi laut yang baik serta memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pantai Depok merupakan obyek wisata sekaligus area kuliner khas ikan laut yang berada di daerah Bantul Yogyakarta, dengan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai lebih kurang 320.600 ton per tahun. Tempat tersebut digunakan juga oleh nelayan untuk memasarkan hasil ikan laut.

Tempat Pelelangan Ikan Depok atau lebih dikenal dengan nama TPI Mina Bahari 45 adalah tempat pelayanan perikanan di Pantai Depok, Bantul. TPI Mina Bahari 45 memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat. Angka 4 menunjukkan identitas perempuan Dusun Bungkus dan angka 5 menunjukkan perempuan Dusun Depok, yang menunjukkan TPI hadir sebagai semangat warga secara gotong-royong untuk berdaya. TPI Mina Bahari 45 didirikan pada tahun 1998 oleh penduduk setempat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan latar belakang kesulitan ekonomi dan munculnya pengangguran pada kondisi krisis moneter saat itu mulai muncul inisiatif dari masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara lebih intensif. Dengan kondisi sosial bercorak agraris, awalnya pengelola TPI Mina Bahari 45 kesulitan dalam membina masyarakat lokal untuk ikut berdaya melalui sektor perikanan dan kelautan. Penduduk lokal awalnya menangkap ikan dengan *jaring eret*, yakni sejenis alat tangkap berupa jaring yang ditabur ke tengah laut dengan berenang dan ditarik ke pinggir dengan tambang.

Pengelola TPI Mina Bahari 45 berusaha meningkatkan kapasitas produksi tangkapan ikan dengan melakukan berbagai langkah. Awalnya dengan mendatangkan nelayan yang menggunakan kapal dari Cilacap (dengan awak 2-3 orang) dan bisa masuk ke Pantai Depok, Bantul. Nelayan *jaring eret* kemudian diikutkan dalam usaha penangkapan ikan bersama nelayan dari Cilacap. Lambat laun nelayan lokal semakin mahir dalam mengoperasikan kapal mulai dari menghidupkan mesin sampai menjalankannya, dan akhirnya nelayan *jaring eret* banyak yang beralih melaut dengan kapal jenis kapal motor tempel. Dengan melaut sendiri penduduk lokal kini dapat ikut membantu meningkatkan produksi ikan. Untuk membantu perekonomian setempat, pengelola TPI Mina Bahari 45 juga mengorganisasikan masyarakat untuk membentuk koperasi.

TPI Mina Bahari 45 sendiri secara struktural berada di bawah koordinasi dan kontrol koperasi dengan nama yang sama. TPI Mina Bahari 45 sebagai bagian dari koperasi memiliki peran

dalam proses pelayanan perikanan dari nelayan untuk dipasok ke pasar. Mulai tahun 2009 TPI Mina Bahari 45 mulai dirangkul pemerintah dan mendapatkan perhatian serius Dinas Kelautan dan Perikanan pasca penetapan Pantai Depok sebagai pusat kuliner *seafood* pada tahun 2009, meskipun sudah mendapat izin operasional dari pemerintah daerah semenjak awal tahun 2000-an. TPI Mina Bahari 45 juga memiliki fungsi sebagai tempat suplai ikan bagi kelompok usaha yang berada di bawah naungan Koperasi Mina Bahari 45. Di bawah Koperasi Mina Bahari 45 sendiri terdapat beberapa kelompok usaha yang dinaungi dan bermitra dengan TPI yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pedagang Asong, KUB Pedagang Ikan/Peyek, KUB Warung pengolah, KUB nelayan, KUB pedagang *degan*. Secara struktural hal ini tentu sangat menarik dimana seharusnya sebuah tempat pelelangan ikan dikelola dan dijalankan melalui sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, namun dalam kasus ini relasi antara TPI Mina Bahari 45 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul adalah dalam taraf koordinasi, perlindungan dan pembinaan. TPI Mina Bahari 45 tetap memberikan retribusi sebanyak 2 % dari harga lelang kepada DKP Bantul sebagai wujud pemasukan daerah, namun dalam proses tata kelola di dalam TPI sendiri tetap dijalankan sesuai mekanisme di Koperasi Mina Bahari 45. Struktur organisasi Mina Bahari 45 lebih lanjut adalah sebagai berikut :

TPI Mina Bahari 45 sendiri memiliki landasan yang baik dalam upaya meningkatkan pelayanan perikanan di Pantai Depok Bantul. Visi dari TPI Mina Bahari 45 adalah "Menyelenggarakan Pelelangan Ikan dengan Cepat, Tepat, Akurat, dan Transparan yang Menguntungkan Semua Pihak." Dari visi tersebut dirumuskan beberapa misi dari TPI Mina Bahari 45, yakni:

- Menyegerakan tindakan terhadap ikan yang akan dilelang.
- Mengefektifkan alat timbang dan menjaga kebersihan.
- Menertibkan Administrasi Pelelangan
- Meningkatkan Kinerja Pengurus
- Berkoordinasi dengan Pemerintah/dinas terkait.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi di atas TPI Mina Bahari 45 memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut :

Di TPI Mina Bahari 45 sendiri terdapat 56 pengguna motor tempel (PMT) yang terdaftar, 45 nelayan lokal, 71 nelayan *andon*, dan 30 pendorong perahu yang terdaftar. Bila dibandingkan dengan jumlah nelayan lokal, nampaknya jumlah nelayan *andon* lebih mendominasi. Nelayan *andon* adalah nelayan yang berasal dari luar wilayah pantai Depok,

Bantul yang untuk sementara waktu mencari ikan , bersandar serta menjual tangkapan di TPI Mina Bahari 45. Kebanyakan nelayan *andon* berasal dari Cilacap dan selama beberapa minggu menetap di Depok, Kretek, Bantul untuk mencari hasil ikan dan menjualnya. Nelayan *andon* relatif mendominasi karena memang pekerjaan mereka mencari hasil tangkapan ikan di laut dan tidak mengenal musim ikan. Berbeda dengan nelayan lokal yang hanya melaut saat musim ikan berlangsung, di luar itu mereka bekerja sebagai buruh tani, dimana ini adalah pekerjaan awal mereka sebelum ada TPI Mina Bahari 45. Sayangnya TPI Mina Bahari 45 tidak memberikan pendampingan khusus bagi nelayan lokal yang hanya melaut secara musiman.

"Nelayan lokal melaut saat musim ikan, sedangkan di luar itu tetap menjadi buruh tani. Nelayan andon yang memang memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan tetap melaut dan tidak mengenal musim ikan."

Dari pemerintah daerah sendiri terlibat dalam segi pembinaan dalam operasional TPI Mina Bahari 45. Dinas yang terkait dalam pengelolaan ekonomi di Pantai Depok, Bantul adalah Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi. Sedangkan dalam segi operasional TPI Mina Bahari 45 menjalankannya secara mandiri dan memberikan 2 % dari retribusi hasil lelang sebagai pemasukan daerah.

Proses pelayanan di TPI Mina Bahari 45 dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

Pertama, kapal yang merapat dari laut ke daratan dijemput oleh para pendorong perahu sebanyak 3-4 orang menggunakan gerobak yang telah dimodifikasi yang diberikan di depan kapal. Proses pemindahan kapal ke daratan dilaksanakan secara gotong royong antara awak kapal yang berjumlah 2-3 orang dan para pendorong kapal. Setelah kapal sampai di daratan, tahapan selanjutnya adalah pengangkatan ikan ke TPI, untuk melaksanakan prosesi pelelangan ikan. Namun realita yang terjadi tidaklah demikian, setelah sampai di daratan ternyata nelayan lebih memilih menawarkan ikan kepada para wisatawan yang ada di Pantai Depok, Bantul. Para nelayan memilih langsung menjual kepada wisatawan karena dianggap lebih menguntungkan daripada dijual melalui proses lelang di TPI Mina Bahari 45. Sayangnya dari para pengurus TPI Mina Bahari 45 tidak ada proses penindakan terhadap transaksi ikan langsung kepada wisatawan. Pembatasan tangkapan ikan untuk jenis yang dilarang pemerintah pun nampaknya sangat minim. Saat peneliti melakukan proses pengamatan ternyata banyak sekali nelayan yang menangkap anakan ikan hiu dan langsung menjualnya kepada wisatawan maupun pemilik warung makan.

"Menjual ikan langsung kepada wisatawan itu sebenarnya tidak boleh, Mas. Bagaimana pun juga transaksi ikan hanya boleh dilakukan di TPI. Namun, kami dari pihak TPI sendiri hanya sekedar memberikan himbauan dan tetap menunggu nelayan yang datang ke TPI untuk melaksanakan proses lelang.

Langkah pemerintah daerah yang memberikan pandangan berbeda dalam pengembangan ekonomi Pantai Depok, Bantul bisa jadi menjadi penyebab masalah nelayan yang tidak menjual ikan melalui TPI. Dinas Pariwisata Bantul fokus untuk menjadikan Pantai Depok sebagai pusat kuliner *seafood* dan *waterpark*, namun sayangnya dalam usaha pengembangan wisata kuliner tersebut tidak mempertimbangkan kemandirian produksi lokal, justru memasok ikan dari luar daerah karena dianggap produktivitas nelayan belum mampu mencukupi kebutuhan. Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul fokus pada upaya pengembangan ekonomi berbasis nelayan dengan mengoperasionalkan tempat pelelangan ikan dan pasar ikan. Sikap yang berbeda dari tiap instansi pemerintahan ditambah dengan hasil tangkapan ikan yang bersifat musiman telah menyebabkan pengembangan ekonomi yang dualistis di Pantai Depok. Di satu sisi ingin meningkatkan pariwisata kelas internasional, namun di sisi lain juga ingin menghidupkan kemandirian masyarakat lokal, namun karena sudut pandang yang diambil berbeda pemerintah daerah menjadi kehilangan arah dalam memberdayakan masyarakat setempat.

Kondisi yang dualistis dan sifat tangkapan ikan yang bersifat musiman turut mempengaruhi dalam proses operasional TPI Mina Bahari 45. TPI Mina Bahari 45 sendiri memiliki jam operasional yang tidak terlalu baku yaitu mulai jam 08.00 sampai dengan tidak adanya nelayan yang datang untuk melaksanakan proses lelang ikan. Pada musim paceklik ikan maupun keadaan abrasi, TPI Mina Bahari 45 hanya melaksanakan operasional selama 2 jam. Kurangnya inisiatif dari petugas TPI Mina Bahari 45 untuk berkeliling mengawasi transaksi ikan dan mendorong nelayan langsung menuju TPI untuk melaksanakan proses lelang bisa jadi menjadi penyebab nelayan memilih menjual langsung kepada wisatawan. Dalam berbagai kesempatan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa petugas hanya menunggu di kantor TPI Mina Bahari 45 sampai ada nelayan yang datang untuk melaksanakan lelang ikan. Pada keadaan lain justru tengkulak ikan lah yang menjadi pendorong dan memacu nelayan untuk memobilisasi menuju TPI untuk melaksanakan proses lelang. Pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul dalam segi operasional TPI Mina Bahari 45 hanya terbatas pada tindakan pengambilan retribusi dan bukti transaksi lelang ikan setiap tiga bulan sekali.

Pertimbangan nelayan juga adalah karena alasan hasil yang tidak menentu, apabila melakukan penjualan melalui proses transaksi di TPI.

"Sekali berangkat ongkosnya sebesar 150 ribu. Saya lebih memilih menjual langsung kepada wisatawan karena keuntungannya lebih banyak dan bisa mendapat sampai 250 ribu satu kali menjual. Dibandingkan menjual melalui lelang, paling Cuma dapat 100-150 ribu.

Kedua, proses selanjutnya dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan TPI Mina Bahari 45 dalam keadaan yang wajar adalah tahap pemisahan ikan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas. Ikan yang telah dikelompokkan kemudian ditimbang dan diberikan karcis. Setelah ikan ditimbang, maka proses lelang akan berlangsung. Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan. Pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang. Pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis lelang. Terakhir, nelayan dapat mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis timbang. Selain itu para nelayan yang melelang ikan di TPI juga dikenakan pajak atau kontribusi sekitar 9%–10%, dimana pajak atau kontribusi tersebut digunakan untuk, 4% untuk pendorong; 1% untuk sarpras (sarana-prasarana); 2% untuk insentif; 1% untuk asuransi; 0,5% untuk dansos (dana sosial); 0,5% untuk *saving* (tabungan nelayan); 0,5% untuk SAR; 0,5% untuk operasional pengurus); 0,5% untuk wilayah; 0,3% untuk keamanan; 0,2% untuk tabungan pendorong. Untuk melaksanakan proses lelang ikan, petugas yang melaksanakannya tidak perlu memiliki kemampuan khusus. Pembinaan yang dilakukan kepada petugas proses pelelangan ikan sebatas pada pengetahuan dan keterampilan menggunakan timbangan dan prosedur transaksi.

" Tidak ada keterampilan khusus yang dilakukan untuk melakukan proses lelang ikan. Proses seleksi petugas juga hanya terbatas pada pembinaan aspek prosedur dalam pelelangan ikan.

Untuk menunjang proses pelayanan perikanan, TPI Mina Bahari 45 juga melakukan penguatan dalam segi organisasi. Penguatan dalam organisasi ini dilakukan melalui mekanisme rapat rutin di dalam Koperasi Mina Bahari dan evaluasi pengurus TPI. Anggota TPI Mina Bahari Empat Lima juga mempunyai kegiatan-kegiatan rutin yang selalu diadakan selain menangkap ikan, salah satunya adalah arisan. Arisan tersebut diadakan 35 hari sekali atau jaraknya *sakpasaran dino* biasanya diadakan malam senin dan bergiliran dari satu

rumah ke rumah yang lain antar anggota. Agenda kultural ini tentu akan bermanfaat dalam menjalin intimasi dan solidaritas antara pengurus dan anggota Mina Bahari 45, sehingga akan membantu dalam menunjang kegiatan pelayanan perikanan. Kegiatan lain seperti sedekah laut bersih-bersih pantai juga menjadi wahana untuk menjalin kedekatan antara pengurus Mina Bahari 45, pedagang, nelayan, dan masyarakat setempat. Selain itu kegiatan arisan juga dijadikan sebagai sarana penyampaian unek-unek bagi para anggota TPI, pada saat arisan para anggota TPI selalu menyampaikan apa yang ada dipikiran mereka dan menjadi unek-unek mereka.

Secara garis besar penguatan kapasitas yang dilakukan TPI Mina Bahari 45 dalam menunjang kinerja pelayanan perikanan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Langkah Penguatan yang dilakukan TPI Mina Bahari 45 dalam berbagai level

SIMPULAN

TPI Mina Bahari 45 telah hadir dalam upaya meningkatkan tata kelola di Pantai Depok, Bantul. Dengan latar belakang pendirian dalam kondisi sosial yang sedang diterpa krisis

moneter dan peningkatan jumlah pengangguran, TPI Mina Bahari 45 muncul sebagai upaya peningkatan perekonomian di bidang kelautan dan perikanan. TPI Mina Bahari 45 mengorganisasikan masyarakat untuk terlibat dalam proses peningkatan produksi hasil tangkapan laut melalui mekanisme lelang ikan. TPI Mina Bahari 45 juga menjadi wadah untuk melaksanakan proses pelayanan perikanan di Pantai Depok, Bantul. Untuk menunjang peranannya TPI Mina Bahari 45 melakukan berbagai cara penguatan kapasitas.

Pada level sistem, TPI Mina Bahari 45 telah melakukan penguatan kapasitas dengan melakukan pembakuan administrasi dan koordinasi serta pembinaan yang kuat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul. Dalam langkah pembakuan administrasi, TPI Mina Bahari 45 telah menetapkan 56 pengguna motor tempel (PMT) yang terdaftar, 45 nelayan lokal, 71 nelayan andon, dan 30 pendorong perahu sebagai anggota dan sasaran pelayanan. TPI Mina Bahari 45 juga telah membakukan prosedur pelelangan ikan dengan membuat alur lelang ikan secara baik dan seksama. Hadirnya koperasi juga menjadi payung pelaksana dari pemberdayaan anggota Mina Bahari 45. Dari segi koordinasi setiap tiga bulan sekali DKP Bantul rutin berkunjung untuk mengevaluasi proses lelang ikan dengan meminta bukti transaksi dan memberikan himbauan.

Pada level organisasi, TPI Mina Bahari menjadikan agenda kultural sebagai sarana membangun kedekatan antara pengurus dan anggota, sehingga bisa memicu proses kinerja pelayanan yang baik. Agenda kultural seperti sedekah laut diwujudkan sebagai cara membangun kedekatan antar aktor dan bukti kedekatan pada Tuhan. Agenda bersih-bersih pantai menjadi sarana untuk membangun kekompakan antara pengurus dan anggota. Agenda arisan menjadi sarana anggota dan pengurus untuk menyalurkan keluh kesah dalam operasional organisasi.

Pada level individu, TPI Mina Bahari 45 melakukan pelatihan dan himbauan kepada nelayan maupun petugas untuk menunjang pelayanan perikanan. Pelatihan dilakukan pertama kali dengan melibatkan dan memberi akses pada nelayan dari Cilacap untuk melaut di Depok sekaligus melatih nelayan lokal dalam mengoperasikan kapal motor tempel. Proses himbauan-himbauan dilakukan kepada nelayan agar menaati prosedur pelayanan perikanan seperti tidak langsung menjual ikan pada wisatawan. Sedangkan, bagi petugas dilaksanakan kualifikasi yang baik dalam pemilihan pelaksana kegiatan lelang ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Bantul Jalani Mitra dengan Pemasok Ikan Luar Daerah* (<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/04/24/518458/bantul-jalani-mitra-dengan-pemasok-ikan-luar-daerah>, diakses pada 4 April 2017).
- Anonim, *Data Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kabupaten Bantul 2012* (<http://dkp.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/07/DATA%20TEMPAT%20PELELANGAN%20IKAN%202012.pdf>, diunduh pada 4 April 2017).
- Anonim, *Pelayanan Publik Sektor Pendidikan. Policy Brief.* (<http://www.kinerja.or.id/pdf/b5d704e8-196b-433d-92e3-ab3a1e3b39f3.pdf>, diunduh pada 4 April 2017).
- Anonim, *Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Depok Perlu Diperbaiki.* (<http://www.solopos.com/2017/01/23/tempat-pelelangan-ikan-di-pantai-depok-perlu-diperbaiki-786868>, diakses pada 4 April 2017).
- Anonim, *Tempat Pelelangan Ikan Pantai Depok Yogyakarta* (<https://gudeg.net/direktori/1415/tempat-pelelangan-ikan-pantai-depok-yogyakarta.html>, diakses pada 4 April 2017).
- Chriamawan, Andreas Soni. (2016). *Skripsi. Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan, Pusat Kuliner Dan Waterpark Di Pantai Depok, Bantul.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dianto, Muhammad Wahyu; Nuddin Harahab dan Ismadi. (2015) *Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan Di Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jurnal ECSOFIM, Vol. 3 No. 1, 2015. Hlm 1-14.*
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. Ed. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Doali, Jooce F., *Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tonai Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe'* (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/7604/7162>, diunduh pada 4 April 2017).
- Fawaid, Achmad. Terj. . John. W. Cresswell. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hendri dan Ernawati. (2014). *Analisis Kinerja Perangkat Kecamatan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir). Jurnal Jom FISIP, Volume 1 No. 2 , Oktober 2014. Hlm 1-4.*
- Indrawijaya, Adam. (1989). *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung : Penerbit Sinar Bar.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. (2015) *Kapitalisme, Negara, dan Masyarakat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tempat Pelelangan Ikan.
- Pramitasari, Sulistyani Dyah; Sutrisno Anggoro, dan Indah Susilowati. (2006). *Analisis Efisiensi Tpi (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1, 2 Dan 3 Di Jawa Tengah Dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. Jurnal Pasir Laut, Vol. 1, No.2, Januari 2006. Hlm 12-21.*

- Purwantara, Suhadi ; Sugiharyanto dan Nurul Khotimah. (2015). *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul Berdasarkan Karakteristik Spasial* (Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNY Ke-51 pada 21-22 April 2015). Hlm 1-19.
- Rodi. (2015). Skripsi. *Peran Koperasi Wisata Mina Bahari 45 dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Studi di Pantai Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sahubawa, Latif; Nurul Khakim dan Musrowati Lasindrang. (2015). *Kajian Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Upaya Percepatan Investasi*. *Jurnal Tekno Sains*, Volume 4 No.2, 22 Juni 2015. Hlm 101-120.
- Saputri, Rani Danik. (2013). *Skripsi. Bentuk Interaksi Nelayan Di Tempatpelelangan Ikan (Tpi) Mina Bahari Empat Lima depok Parangtritis Kretek Bantul yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sidik, Heri. (2017). *Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Di Bantul Menurun*(<http://jogja.antarane.ws.com/berita/344425/fungsi-tempat-pelelangan-ikan-di-bantul-menurun>, diakses pada 4 April 2017).
- Sinapoy, Fitriani. (2016). *Analisis Pemberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Kota Kendari*. *Executive Summary*. Kendari : Universitas Halu Oleo. Hlm 1-21.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarelawanto, Ema. (2017). *Bantul Optimalkan Fungsi Pelelangan Ikan Pantai Selatan*. (<http://semarang.bisnis.com/read/20160305/2/85518/bantul-optimalkan-fungsi-pelelangan-ikan-pantai-selatan>, diakses pada 4 April 2017).
- Triyanti, Riesti. (2011). *Peran Tempat Pelelangan Ikan Panimbang Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang*. *Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan*, Vol. 6 No. 1. Hlm 23-27.
- Yustika, Ahmad Erani. (2014). *Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.